

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abuddin Nata, 2014, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Ardiansyah, 2018, *Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat*, Jakarta: Gerbang Visual
- Aprilianti dan Kasmawati, 2022, *Hukum Adat Indonesia*, Lampung: Pusaka Media.
- Ariesta Wibisono dan Rosdayana Khairummah, *Meninjau Potensi Keberadaan Hak Asasi Manusia Masyarakat Adat Di Wilayah Ibu Kota Negara Baru, dalam Ibu Kota Negara Baru dan Masa Depan Republik*, Bandung: PT. Tubagus Lima Korporat.
- Amri Panahatan Sihotang, 2023, *Hukum Adat Indonesia*, Semarang: USM Press.
- Burhan Ashofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Djamanat Samosir, 2013, *Hukum Adat Indonesia (Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia)*, Bandung: Tarsito.
- Erwin Owan Hermansyah Soetoto, Zulkifli Ismail, dan Melanie Pita Lestari, 2021, *Hukum Adat*, Malang: Medza Media
- H. Ishaq, 2020, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta.
- Husen Alting, 2010, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- I Dewa Gede Palguna, 2013, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-hak Konstitusional Warga Negara*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Merah Johansyah, 2021, *Ibu Kota Baru Buat Siapa?*, Jakarta: Forest Watch Indonesia
- Moh Mahfud MD, 2001, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: Rineka Cipta.
- Murtadha Muthahhari, 2012, *Masyarakat dan Sejarah*, Yogyakarta: Rausyanfikir Institute
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.

- P.H Hadjon, 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Peradaban.
- Philippus Hadjono, 2005, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University.
- Ratno Lukito, 2016, *Perbandingan Hukum: Pendekatan Teori Dan Metode*, Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Robi Cahyadi, 2022, “Masa Depan Ekologi Ibukota Negara Baru dan Masa Depan Republik”, *Ibukota Negara Baru dan Masa Depan Republik Indonesia*, Bandung: PT. Tubagus Lima Corporat.
- Rudy, 2022, *Hukum Pemerintahan Desa*, Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja
- Salman S.O, 2011, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Bandung: Alumni
- Soejono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Soimin dan mashuriyanto, 2013, *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press
- S. Warjiyati, 2020, *Ilmu Hukum Adat*, Yogyakarta: Deepublish
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 2007 *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta: Balai Pustaka

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN)
- Peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2012 mengenai Rencana Tata Kota Kalimantan

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 320 Tahun 2024 Tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Kalimantan Timur

Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

Peraturan Direktur Jenderal Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Revitalisasi Desa Adat Tahun 2019

### **C. Putusan**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XX/2012

### **D. Jurnal dan Artikel**

Afifah Kusumadara, 2013, “Perkembangan Hak Negara Atas Tanah: Hak Menguasai atau Hak Memiliki?”, Jurnal Fakultas Hukum Brawijaya, Vol. 20, No. 2.

Bhakti Eko Nugroho, 2022, “Perlindungan Hak Masyarakat hukum adat Dalam Pemindahan Ibu Kota Negara”, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi, Vol. 6, No.1.

Campbell, Scott. 2003, “The Enduring Importance of National Capitals in the Global Era”, Urban and Regional Research Collaborative, Working Papers Series 32.

Erwin Basrin, Dedek Hendy, dan Pramasty Ayu Krindinar, 2020, “Rumusan Hasil Seminar dan Konsultasi, Pengakuan Masyarakat Hukum Adat dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia”.

Firnaherera, V. A., dan Lazuardi, A, 2022, Pembangunan Ibu Kota Nusantara: Antisipasi Persoalan Pertanahan Masyarakat Hukum Adat, JSKP: Jurnal Studi Kebijakan Publik, Vol. 1, No. 1

Grobmann, K., 2019, Dayak, Wake Up, Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Vol. 175, No. 1

H. M. Yahya, 2018, “Pemindahan Ibu Kota Negara Maju dan Sejahtera”, Jurnal Studi Agama dan Masyarakat Universitas Merdeka Malang, Vol. 14.

Indah Anggraini Novitasari, Farina Gandryani, Fikri Hadi, 2023, “Legalitas Komunal Atas Kelestarian Hutan Adat Di Wilayah Ibu Kota Nusantara”, Jurnal Mimbar Keadilan, Vol. 16, No. 1.

- Jawahir Thontowi, 2015, "Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dan Implementasi Perlindungan Hak-Hak Tradisionalnya", *Pandecta Law Journal* Vol. 10, No. 1
- Lutgardis Junita Gusa, 2021, "Pengakuan Dan Perlindungan Pemerintah Daerah Terhadap Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Di Kabupaten Ende", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana.
- Nadya Dwi Cahyani dan Indri Fogar Susilowati, 2022, "Kajian Yuridis Pengakuan Masyarakat Hukum Adat di Wilayah IKN dalam Upaya Memberikan Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum adat", Fakultas Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya.
- Maria Noviyani dan Dina Paramitha Hefni Putri, 2021, "Tinjauan Yuridis Terhadap Keberadaan Hukum Adat di Samarinda", *Jurnal LEGALITAS Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda*, Vol. 6, No. 1.
- Quane, H., 2005, "The Rights of Indigenous Peoples and the Development Process", *Human Rights Quarterly*, Vol. 27, No. 2.
- Reka Gusnaeni dan Firmansyah Putra, 2023, "Analisis Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Ibu Kota Baru", *Limbago Journal of Constitutional Law, Universitas Jambi*, Vol. 3, No. 3.
- Schiller, A., 2007, "Activism and Identities in an East Kalimantan Dayak Organization", *The Journal of Asian Studies*, Vol. 66, No. 1.
- Septya Hanung Surya Dewi, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, Fatma Ulfatun Najicha, 2020, "Kedudukan dan Perlindungan Masyarakat Adat Dalam Mendiarni Hutan Adat", *Jurnal Legislatif*, Vol. 4
- Sulaiman, M. Adli, dan Mansur, T. M, 2019, "Ketidakteraturan Hukum Pengaturan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia", *Law Reform Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, Vol. 15, No. 1.
- Tiara Rebecca Kezia Siregar, Kayus Kayowuan Lewoleba, 2024, "Dinamika Hukum Sosial dan Budaya Pada Eksistensi Masyarakat Adat Kalimantan Timur Di Era Pembangunan IKN", *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 4, No. 1.
- Yogi Zul Fadhli, 2016, Inkonstitusionalitas Pasal 19 Perma Nomor 2 Tahun 2016 dan Implikasinya terhadap Akses Keadilan warga Negara, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13, No. 4.
- Yusuf Salamat, 2015, "Analisis Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 Terhadap Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Berdasarkan Pasal 67 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan", *Jurnal Ilmiah Nasional Universitas Atma Jaya*.



Widya Yuridika, 2022, "Kajian Yuridis Masyarakat Hukum Adat", Jurnal Hukum Universitas Mataram, Vol. 5, No. 1.

Wiersma. L.L, 2005, "Indigenous Lands as Cultural Property: A New Approach to indigenous Land Claims", Duke Law Journal, Vol. 54, No. 4.

Wilson Fernando, 2023, "Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Adat IKN, Dengan Tinjauan Terhadap Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Dan Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah Ulayat", Mandalika Law Journal Universitas Tarumanegara, Vol. 1, No. 1.

#### E. Website

Aida Mardatillah, 2022, "*Pemohon Berharap MK Kabulkan Uji Formil UU IKN*", <https://www.hukumonline.com/berita/a/pemohon-berharap-mk-kabulkan-uji-formil-uu-ikn-lt629846f482e39/>

Charliesta, 2023, "*Urgensi Pengesahan RUU Masyarakat Hukum Adat Demi Menjamin Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat*", <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portofolio/urgensi-pengesahan-ruu-masyarakat-hukum-adat-demi-menjamin-hak-hak-masyarakat-adat/>

CNN Indonesia, 2022, "*BPN Bakal Beri 7500 Sertifikat Tanah Di Wilayah Ibu Kota Baru*", <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220130080841-92-752956/bpn-bakal-beri-7500-sertifikat-tanah-di-wilayah-ibu-kota-baru/amp>.

Dewan Ketahanan Nasional, 2024, "*Presiden Jokowi Tinjau Kantor Presiden di IKN, Progres Pembangunan Capai 74 Persen*", <https://www.wantannas.go.id/presiden-jokowi-tinjau-kantor-presiden-di-ikn-progres-pembangunan-capai-74-persen>

Edward Nainggolan, "*Urgensi Pemindahan Ibu Kota Negara*" <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/14671/Urgensi-Pemindahan-Ibu-Kota-Negara.html>

Iryanda Mardanz, 2024, "*Reproduksi Kolonialisme di IKN?*", <https://www.dw.com/id/reproduksi-kolonialisme-di-ikn/a-69890107>

Kompas.com, 2022, "*Eks Penasihat KPK Abdullah Hehamahua Dkk Gugat UU IKN ke MK*", <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/02/20511501/eks-penasihat-kpk-abdullah-hehamahua-dkk-gugat-uu-ikn-ke-mk>

M. Ghofar, 2024, "*Jumlah Masyarakat Hukum Adat Kaltim Naik jadi Enam*", <https://kaltim.antaranews.com/amp/berita/210780/jumlah-masyarakat-hukum-adat-kaltim-naik-jadi-enam>

Muhammad Rafi Bakri, 2024, *“Pembangunan IKN Tahap I Hampir Rampung, Selanjutnya?”*, <https://nasional.kompas.com/read/2024/05/15/14351851/pembangunan-ikn-tahap-i-hampir-rampung-selanjutnya?page=all#page2>,

Petrik Matanasi, *“Dari Palembang sampai Jonggol, rumitnya cari Ibu Kota Baru”* <https://www.cnbcindonesia.com/news/202201191229264308668/dari-palembang-sampai-jonggol-rumitnya-ri-cari-ibu-kota-baru>

MKRI, 2015, *“Hak Dan Kewajiban Warga Negara Indonesia Dengan UUD 45”*, <https://www.mkri.id/index.php?id=11732&page=web.Berita>

Tim Hukumonline, 2023, *“Kedudukan Presiden Dalam Sistem-Sistem Pemerintahan”*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/sistem-pemerintahan-presidensial-lt62620ec872ac9/>

Vernando, Zaki. *“Skema KPBU, Apa Perannya dalam Mendukung Pembangunan IKN?”* <https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/1142-1364/umum/orang-juga-bertanya/skema-kpbu-apa-perannya-dalam-mendukung-pembangunan-ikn>

Website resmi IKN, 2023, *“Otorita IKN Pastikan Keberlangsungan Masyarakat Adat dan Kearifan Lokal”*, <https://www.ikn.go.id/otorita-ikn-pastikan-keberlangsungan-masyarakat-adat-dan-kearifan-lokal>

